

## REKAP 1A: K/L

### RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

#### TAHUN ANGGARAN 2024

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA** : SEKRETARIAT NEGARA
- 2. VISI** : Kementerian Sekretariat Negara yang berintegritas, andal, inovatif, dan kolaboratif dalam memberikan pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong
- 3. MISI** :
1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, responsif, dan inovatif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara
  2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi pelayanan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media serta koordinasi pengamanan yang optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden
  3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian Sekretariat Negara

#### 4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2024 (RIBU)
Total		0,0

#### 5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas		1.825.751,0
01.01	Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100	
01.02	Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan RI...	100	
02	Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas		38.972.356,0
02.01	Indeks Kualitas Analisis Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden	3,03 Skala 4	
02.02	Indeks Kualitas Analisis Kebijakan kepada Wakil Presiden	3,58	
02.03	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	50%	